

# STRATEGI KERJA SAMA INDO-PASIFIK UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA: PERSPEKTIF INDONESIA

## INDO-PACIFIC COOPERATION AS A STRATEGY TO ENHANCE STATE DEFENSE: INDONESIA'S PERSPECTIVE

Indri Yanuarti<sup>1</sup>, Makarim Wibisono<sup>2</sup>, I Wayan Midhio<sup>3</sup>

Program Studi Strategi Perang Semesta Universitas Pertahanan

[n.dryanuar@gmail.com](mailto:n.dryanuar@gmail.com)

**Abstrak** – Sejak awal diartikulasikan oleh Presiden AS Donald Trump pada bulan November 2017, konsep *Free and Open Indo-Pacific (FOIP)* semakin menarik perhatian atas Indo-Pasifik sebagai wujud pergeseran geopolitis. FOIP pada akhirnya dianggap sebagai langkah awal untuk memperkuat strategi penghadangan melawan kebangkitan Cina dan untuk merekonstruksi tatanan regional. Beberapa *flashpoint* di kawasan pun tidak terhindarkan bahkan pada tataran tertentu semakin memperburuk situasi akibat rivalitas AS-Cina. Indonesia sebagai *natural leader* ASEAN menyadari bahwa negara-negara *middle power* tidak semestinya berdiam diri dalam mencermati perubahan lingkungan strategis yang didominasi dengan rivalitas AS-Cina, hingga menstimulasi konsep-konsep Indo-Pasifik sebagai geostrategi. Gagasan Indonesia agar ASEAN memiliki konsep Indo-Pasifik yang lebih inklusif, terbuka dan tetap menghormati hukum internasional akhirnya disahkan sebagai panduan bersama, yaitu *ASEAN Indo-Pacific Outlook (AOIP)* pada 23 Juni 2019. Dokumen AOIP yang masih bersifat politis tentu perlu ditindaklanjuti secara lebih komprehensif. Dari sudut pandang Indonesia, AOIP dapat menjadi modalitas untuk terus mencapai kepentingan nasional melalui sebuah strategi kerja sama Indo-Pasifik. Penelitian ini berupaya memetakan ancaman dan peluang sebagai konsekuensi pengaruh lingkungan strategis Indo-Pasifik, khususnya terhadap pertahanan negara. Selanjutnya penelitian ini juga berupaya merumuskan strategi kerja sama Indo-Pasifik yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pertahanan negara. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber yang kompeten dan data sekunder dari studi literatur serta analisis berdasarkan teori yang relevan seperti teori strategi, kerja sama, konsep pertahanan dan diplomasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya mengarahkan AOIP sebagai arah kerja sama yang dapat mendukung pertahanan negara, baik militer dan non militer yang lebih menekankan pada kerja sama untuk mengatasi ancaman non-tradisional dibandingkan ancaman tradisional.

**Kata kunci** : Strategi, Kerja sama Internasional, Indo-Pasifik, Rivalitas AS-China, Pertahanan Negara

**Abstract** - Since the initial articulation by the United States (US) President Trump in November 2017, the concept of a Free and Open Indo-Pacific (FOIP) has attracted growing concern over Indo-Pacific as a geopolitical shift. FOIP has eventually been regarded as starting point to establish a containment against the rise of China and to reconstruct the regional order. Some flashpoints that tend to spark were inevitable, and to some extent, could further worsen the situation due to US-China rivalry.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan (Cohort 10)

<sup>2</sup> Professor Makarim Wibisono adalah dosen tetap Universitas Pertahanan sekaligus pembimbing pertama penelitian.

<sup>3</sup> Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. I Wayan Midhio, M.Phil. adalah dosen tetap Universitas Pertahanan sekaligus pembimbing kedua penelitian.

*Indonesia as a natural leader of ASEAN realizes that middle power countries should not remain silent in witnessing the dynamic of strategic environment dominated by US-China rivalry that has stimulated Indo-Pacific concepts as geostrategy. An Indo-Pacific concept derived from Indonesia's perspective that is more inclusive, open and continues to respect international law and norms has finally been adopted as a joint guidelines, namely ASEAN Indo-Pacific Outlook (AOIP) on June 23 2019. AOIP document might be political in nature, hence it need a comprehensive follow-up. From Indonesia's point of view, AOIP can be used a modality to further achieve its national interests based on Indo-Pacific cooperation strategy. This research seeks to elaborate threats and opportunities in the field of state defense by assesing the strategic environment impact, particularly the Indo-Pacific phenomenon. In addition, this research also tries to formulate an Indo-Pacific cooperation strategy that will ultimately enhance Indonesia's state defense policy. This study is undertaken by qualitative method using primary data such as interview with distinguished key informants and using secondary data gathered by literature study as well as analysis based on relevant theories: theory of strategy, international cooperations along with the concept of defense and diplomacy. The result of this research indicates the significance of directing AOIP as the basis of cooperation that could enhance the national defense policy, both military and non-military. The said cooperation should emphasize cooperation among countries in the Indo-Pacific region in addressing non-traditional threat rather than traditional threats.*

**Keywords:** Strategy, International Cooperations, Indo-Pacific, US-China rivalry, State Defense

## Pendahuluan

Pembangunan kekuatan pertahanan menjadi hal yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara berdaulat. Untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang muncul, Indonesia menganut dan menerapkan suatu sistem pertahanan semesta (sishanta), tidak agresif dan tidak ekspansif dalam rangka melindungi kepentingan nasional<sup>4</sup>. Namun demikian, dinamika lingkungan strategis nampaknya terus menghadirkan tantangan yang tidak ringan bagi pertahanan negara. Isu-isu geopolitik

masih mewarnai hubungan antar negara di kawasan. Seperti misalnya Rivalitas AS-Cina yang tidak hanya menyentuh sektor ekonomi dan perdagangan saja melainkan bersinggungan pula dengan perluasan pengaruh di kawasan dalam hal stabilitas dan keamanan di Asia, khususnya berkaitan dengan konflik Laut Cina Selatan. Ketegangan AS-Cina berpotensi menjadi api dalam sekam bagi stabilitas keamanan kawasan.

Berdasarkan fenomena tersebut, ASEAN akan sulit berkelit dari perebutan pengaruh (*power projection*) yang dilakukan AS dengan komitmen dana untuk peningkatan kerjasama maupun Cina dengan skema bantuan pembiayaan proyek infrastruktur BRI yang sudah

---

<sup>4</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, hlm.2

dilancarkan sejak tahun 2013. Dalam situasi ini, sentralitas dan kesatuan ASEAN barangkali akan mendapatkan ujian di titik tertinggi. Beberapa negara anggota ASEAN yang dikenal sebagai loyalis AS, seperti Filipina dan Thailand misalnya, mengisyaratkan untuk mulai berpaling dari komitmen aliansinya, dan mendekati ke Cina<sup>5</sup>. Indonesia, meskipun juga ditarik lebih dekat melalui pendekatan ekonomi Cina, tetap harus waspada menempatkan diri. Selain tetap berpijak pada politik luar negeri bebas aktif, Indonesia juga harus mempertahankan posisinya sebagai tulang punggung kekuatan non-blok.

Turbulensi geopolitik tersebut semakin menjelaskan bahwa lingkungan strategis yang penuh dinamika turut menambah kompleksitas ancaman bagi keamanan negara-negara di kawasan. Apalagi mandala yang menjadi medan kompetisi AS dan Cina berada pada kawasan Asia Pasifik yang kini mengalami pergeseran terminologi menjadi kawasan Indo-Pasifik dengan turut memperhitungkan negara-negara

di lingkaran Samudera Hindia, khususnya India. Kawasan ini mencakup negara-negara yang lebih luas dari sekedar Asia Pasifik, menghubungkan Asia dan Afrika dan menempatkan Asia Tenggara sebagai pusat kawasan tersebut<sup>6</sup>.

Dinamika lingkungan strategis yang menggambarkan rivalitas sekaligus peluang kerjasama, khususnya yang terkait dengan AS-Cina ini menimbulkan konsekuensi pilihan kebijakan untuk saling mengakomodasi atau saling kontradiktif satu sama lain sehingga turut mendorong efek *spillover* pada negara-negara lainnya<sup>7</sup>. Tarik ulur kepentingan antara AS dan Cina inilah yang kemudian menjadikan kawasan Indo-Pasifik teater geotratégis tunggal yang mau tidak mau turut menyeret negara-negara di kawasan dalam pusaran dinamika Indo-Pasifik. Asia Tenggara, termasuk Indonesia di dalamnya, merupakan titik pusat (*fulcrum*) Indo-Pasifik.

---

<sup>5</sup> Khasru, Syed Munir. (2017). "The Geopolitical Landscape of Asia Pacific Is Changing Dramatically. Here's How" (online). dalam <https://www.weforum.org/agenda/2017/07/the-geopolitical-landscape-of-asia-pacific-is-changing-dramatically-here-s-how/> hlm.6-9

---

<sup>6</sup> Ras, Abdul Rivai. (2018). "Kerjasama Indo-Pasifik harus Kompatibel dengan Poros Maritim Dunia" diakses dari <https://kumparan.com/abdul-rivai-ras/kerjasama-indo-pasifik-harus-kompatibel-dengan-poros-maritim-dunia-1538475910679321746>, hlm.7

<sup>7</sup> Huang, David. (2015). "Building Security and Integration in The Asia Pacific" (online). dalam <http://www.eastasiaforum.org/2015/06/13/building-security-and-integration-in-the-asia-pacific/>, hlm.16

Dengan prinsip pertahanan defensif aktif, Indonesia berkepentingan merespon potensi ancaman di kawasan dengan langkah-langkah untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan yang kondusif sebagai bagian dari kerangka membangun arsitektur pertahanan negara. Titik berat kepentingan bersama dalam arsitektur pertahanan kawasan adalah menumbuhkan spirit untuk saling menghormati dan rasa saling percaya antar negara-negara di kawasan, sehingga dapat bersama-sama mengantisipasi dan mengatasi berbagai ancaman yang timbul dalam berbagai spektrum<sup>8</sup>.

Untuk itulah, Indonesia bergegas menggagas kerja sama penguatan arsitektur kawasan demi menjamin stabilitas kawasan Indo-Pasifik sehingga mampu menopang kelancaran pembangunan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini, Pemerintah RI c.q Kementerian Luar Negeri telah mengusung konsep kerja sama Indo-Pasifik yang menghendaki

kawasan tersebut mampu menjadi “ekosistem perdamaian, stabilitas dan kemakmuran” sebagaimana ASEAN yang selama ini berkomitmen mewujudkan Asia Tenggara sebagai zona perdamaian, kebebasan dan netralitas. Pengembangan kerangka kerjasama Indo-Pasifik berdasarkan perspektif Indonesia ini didasarkan pada prinsip-prinsip terbuka, inklusif, transparan dan menekankan kerjasama. Konsep kerja sama Indo-Pasifik pada intinya merupakan aspirasi untuk menyuarakan kepentingan Indonesia mengenai penguatan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik yang diarahkan pada peningkatan kerja sama di bidang maritim, konektivitas dan agenda pembangunan berkesinambungan. Indonesia dengan modalitas wilayah maritim yang luas akan memiliki peluang sekaligus tantangan dalam proses penguatan arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Konsep kerja sama Indo-Pasifik yang berlandaskan politik luar negeri bebas-aktif ini juga sejalan dengan visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang juga menjadi arah pembangunan pertahanan negara.

Dalam perkembangan terkini, ASEAN telah menyepakati *ASEAN Outlook on the*

---

<sup>8</sup> Kuliah Umum yang diberikan oleh Menteri Pertahanan RI 2015-2019, Ryamizard Ryacudu. “Kalibrasi Ulang Konsep Strategi Pertahanan RI Menghadapi Disrupsi Dinamika Perkembangan Lingkungan Strategis” yang disampaikan di Auditorium Universitas Pertahanan, Rabu 19 September 2018

*Indo-Pacific* pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand pada tanggal 22 Juni 2019<sup>9</sup>. Konsep kerja sama ini digagas Indonesia dan disirkulasikan sejak tahun 2018 sebagai respon atas rivalitas kekuatan besar yang berpotensi mempengaruhi perdamaian dan stabilitas serta upaya pencapaian kemakmuran di kawasan. *Outlook* tersebut menekankan kesatuan dan sentralitas ASEAN dalam menjunjung prinsip perdamaian, penguatan budaya dialog dan peningkatan kerja sama.

Dengan terkonsolidasinya *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, Indonesia berpeluang menunjukkan peran aktif dalam memajukan kerjasama Indo-Pasifik sekaligus mempromosikan stabilitas keamanan dan kemakmuran di kawasan. Mencermati berbagai konsekuensi baik peluang maupun tantangan kerja sama Indo-Pasifik, peneliti bermaksud mengkaji isu ini lebih lanjut dan menuangkan penelitian ini dengan judul “Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik untuk Mendukung Pertahanan Negara: Perspektif Indonesia”.

### **Metodelogi Penelitian**

---

<sup>9</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2018. *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Y.M. Retno L. P. Marsudi 9 Januari 2018*”

Secara umum penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan penelitian yang memberikan penjelasan atas suatu keadaan secara komprehensif tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.

Penelitian akan dilaksanakan di beberapa instansi terkait di Jakarta, yaitu di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, akademisi dan peneliti dari lembaga-lembaga *think tank*. Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari hingga September 2019. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka dan Dokumentasi serta wawancara mendalam dengan teknik penentuan narasumber berupa purposive sampling. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi data serta sumber literatur.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data inilah kemudian dapat ditarik kesimpulan.

### **Hasil Penelitian**

### **Gambaran Perkembangan Lingkungan Strategis Terkini: Abad Asia dan Narasi Indo-Pasifik**

## 1. Ketegangan di Laut Cina Selatan

Klaim tumpang tindih wilayah perairan LCS dalam sebuah sengketa yang melibatkan Cina dengan beberapa negara ASEAN masih menjadi isu panas di kawasan. Klaim Cina menggunakan dasar *historical rights* yang ditandai dengan *nine-dash line* atau sembilan garis putus-putus yang mengacu pada peta awal dengan bentuk U yang terdiri dari 11 garis segmen. Peta tersebut diterbitkan Cina secara unilateral pada tahun 1947. Dalam perkembangannya klaim *nine-dash line* tidak diakui berdasarkan keputusan Pengadilan Arbitrase (PCA) di Den Haag, Belanda pada 12 Juli 2016.

Nilai strategis LCS memang memang berpotensi untuk meningkatkan *power* suatu negara. Nilai perdagangan di kawasan ini mencapai 5 trilyun dolar AS per tahun. LCS juga diperkirakan memiliki kandungan minyak bumi 213 milyar barel (10 kali lebih banyak dari persediaan minyak AS) dan gas alam yang jumlahnya ditaksir sama dengan cadangan gas alam milik Qatar sebagai

negara ke-3 yang memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia<sup>10</sup>.

Pasca keputusan PCA, Cina justru semakin menunjukkan perilaku asertif dan agresif di LCS dengan berbagai kegiatan militerisasi, termasuk upaya membangun pulau-pulau buatan (*hybrid island*) di wilayah sengketa tersebut. Pengerahan kekuatan militer atau militerisasi juga kerap dilakukan Cina di LCS yang pada akhirnya memicu respon AS. Sejak tahun 2010, AS yang mulai mengembangkan strategi *rebalancing* ke wilayah Asia Pasifik, mulai menggertak Cina karena dinilai terlalu dominan menguasai perairan LCS. Hingga memasuki tahun 2019, Angkatan Laut AS telah memutuskan untuk melakukan FONOPs melintasi LCS secara reguler<sup>11</sup>.

Tensi yang semakin meningkat akibat aksi AS-Cina memang makin memperpanas situasi dan berpengaruh pada kekhawatiran negara-negara di sekitarnya, khususnya ASEAN. Secara konsisten dan konstruktif, ASEAN terus menekankan pendekatan CBMs dalam

<sup>10</sup> Yarger, Harry. R. (2006). *Strategic Theory for The 21st Century : The Little Book on Big Strategy*. Strategic Studies Institute Carlisle

<sup>11</sup> Andika, Dedi. 2019. *Aksi FONOPs Amerika Serikat di LCS Telah Mengusik China* diakses dari <https://jakartagreater.com/aksi-fonops-amerika-serikat-di-lcs-telah-mengusik-china/>

kesepakatan *Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea* (DOC) yang disepakati Cina dan ASEAN tahun 2002. Menurut Prof. Purnomo Yusgiantoro, isu LCS menjadi krusial dalam upaya melindungi kedaulatan wilayah NKRI. Walaupun Indonesia tidak menjadi salah satu negara *claimant* dalam sengketa LCS, namun dari tinjauan posisi geografis Indonesia rentan terkena imbas dari konflik yang terjadi.

## 2. Perang Dagang AS VS Cina

Perang dagang yang terjadi antara AS dan Cina sejak awal tahun 2018 masih terus berkejolak secara fluktuatif. Perang dagang yang sudah mencapai titik keseriusan sedemikian rupa tentu beresiko bagi perlambatan ekonomi global<sup>12</sup>.

**Tabel 1.1 Lini Waktu Perang Dagang AS-Cina 2018-2019**

22 Januari '18	AS menerapkan tarif terhadap produk impor Cina seperti panel surya dan mesin cuci
8 Maret '18	AS kembali menerapkan tarif impor baja dan aluminium tetapi berlaku untuk semua negara
2 April '18	Cina membalas dengan menetapkan tarif impor barang senilai 3 miliar dolar AS
17 April '18	Cina mulai memberlakukan anti-dumping tepung impor dari AS yang mencapai 1 miliar dolar AS
25 Mei '18	AS mengumumkan sanksi untuk perusahaan teknologi Cina, ZTE senilai 1,3

<sup>12</sup> Winarno, Tri. 2019. Perang Dagang Amerika-Cina Ronde Kedua, diakses dari <https://kolom.tempo.co/read/1236097/perang-dagang-amerika-cina-ronde-kedua/full&view=ok>

	miliar dolar AS
15 Juni '18	AS kembali mengumumkan tarif 50 miliar dolar AS untuk barang impor yang diproduksi antara Juli dan Agustus 2018 dan dibalas dengan aksi resiprokal dengan menetapkan tarif senada yaitu 50 miliar dolar AS bagi barang yang diproduksi antara Juli-Agustus 2018
6 Juli '18	AS mengumumkan kenaikan tarif barang 25 persen senilai 34 miliar dolar AS dan dibalas dengan penumuman yang sama yaitu pemberlakuan tarif meningkat 25 persen
23 Agustus '18	AS mengumumkan tarif 16 miliar dolar AS dan dibalas oleh Cina dengan penetapan tarif yang sama
24 September '18	AS mengumumkan tarif 10 persen pada tarif ekspor Cina senilai 200 miliar dolar AS yang diberlakukan hingga akhir tahun 2018. Sebaliknya, Cina menetapkan tarif 5-10 persen pada barang senilai 60 miliar dolar AS
1 Desember '18	AS dan Cina setuju untuk melakukan pertemuan membahas tarif baru
1 Maret '19	Trump menambah 90 hari batas pertemuan dagang dengan Cina
10 Mei '19	AS tingkatkan tarif hingga 25 persen untuk barang Cina senilai 200 miliar dolar AS dan dibalas oleh Cina dengan menetapkan tarif yang sama untuk barang AS senilai 60 miliar dolar AS yang diberlakukan mulai 1 Juni 2019
1 Agustus '19	AS menambah tarif 10 persen pada barang Cina periode 1 September 2019

Sumber: hasil olah peneliti dari berbagai sumber  
Bagaimanapun juga ketegangan AS-

Cina dalam hal perdagangan juga berpotensi menjadi sumbu konflik yang berekses pada stabilitas keamanan kawasan. analisa yang dilakukan oleh Trinh Le<sup>13</sup>, yang menyebutkan bahwa manuver berdasarkan pesimisme yang

<sup>13</sup> Le Trinh, 2018. *How the US-China Trade War Could Impact the South China Sea*. <https://thediplomat.com/2018/11/how-the-us-china-trade-war-could-impact-the-south-china-sea/>

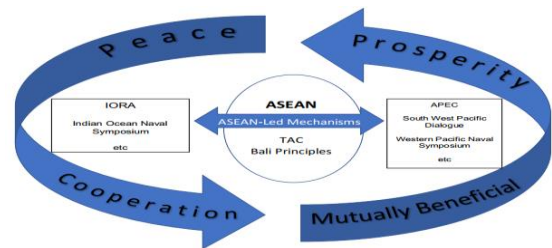
dilakukan beberapa investor terbesar Cina yaitu *Morgan Stanley*, *Jefferies Group* dan *JPMorgan*, telah mengurangi kepemilikan saham mereka di Cina akibat kekhawatiran skenario perang dagang yang lebih besar. Jika situasi tersebut berlanjut, sangat memungkinkan jika Cina mengambil opsi memainkan kartu nasionalismenya dengan berperilaku lebih agresif dalam sengketa maritimnya di LCS.

### Konsep Indo-Pasifik dari Perspektif Indonesia sebagai Cikal Bakal ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)*

Perkembangan lingkungan strategis yang diwarnai peningkatan rivalitas hegemoni AS dan Cina bercirikan pertentangan BRI vs FOIP mendesak Indonesia untuk mengambil sikap. Terlebih lagi revitalisasi *the Quad* berpotensi menjadi koalisi strategis kekuatan eksternal yang tidak melibatkan ASEAN<sup>14</sup>. Oleh karena itu, Indonesia bersikap tanggap dengan mengusulkan sebuah konsep Indo-Pasifik yang berpusat di ASEAN dengan menekankan prinsip-prinsip yang lebih inklusif.

<sup>14</sup> Acharya, Amitav. 2019. *Why ASEAN's Indo-Pacific Outlook Matters* diakses dari <https://www.aspistrategist.org.au/why-aseans-indo-pacific-outlook-matters/> hlm.3

Di tahun 2018 Indonesia gencar melancarkan diplomasinya di tingkat ASEAN, mengusung konsep Indo-Pasifik yang pertama diperkenalkan dengan “*an Indo-Pacific Framework for Mutually Beneficial Cooperation*”



Gambar 1.1 *An Indo-Pacific Framework for Mutually Beneficial Cooperation*

Sumber: Dit. Kerja Sama Polkam ASEAN-Kemlu RI, 2018

Gagasan Indonesia tersebut menghendaki terbangunnya arsitektur kawasan yang dapat lebih memupuk rasa saling percaya (*confidence-building*) dan menumbuhkembangkan dialog (*habit of dialogue*). Penguatan arsitektur kawasan ini akan senantiasa berpegang pada prinsip keterbukaan, inklusivitas, dan menghormati hukum internasional yang berlaku. Indonesia mengusulkan konsep ini akan menjadi dasar kerja sama melalui pendekatan *building block* baik secara bilateral dan plurilateral dengan memanfaatkan mekanisme yang sudah ada seperti IORA dan ASEAN *led-mechanism* sehingga tercipta *linkage* antara arsitektur di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Namun bukan hal yang mudah untuk meyakinkan ASEAN dengan berbagai orientasi kepentingannya masing-masing. Indonesia benar-benar bekerja keras untuk mendorong konsensus ASEAN atas pengajuan konsep Indo-Pasifik perspektif Indonesia, di tengah dinamika lingkungan strategis yang terus bergulir. Ketika Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan *High-Level Dialogue (HLD) on Indo-Pacific Cooperation* pada tanggal 20 Maret 2019, Menlu Retno untuk “menjual” konsep Indo-Pasifik Indonesia yang membutuhkan nilai sentralitas ASEAN. Perjuangan diplomasi Indonesia membuahkan hasil dengan disepakatinya konsep Indo-Pasifik yang ditawarkan Indonesia dengan mengakomodasi berbagai masukan dari negara ASEAN lainnya ke dalam sebuah *final text* ‘ASEAN *Indo-Pacific Outlook*’. Dokumen tersebut disepakati pada pertemuan ASEAN *Senior Officials’ Meeting (SOM)* di Chiang Rai, Thailand pada 8 Maret 2019<sup>15</sup>. Dan puncaknya, dokumen tersebut disahkan sebagai ‘ASEAN *Outlook in the Indo-Pacific*’ (AOIP) pada KTT ke-34 ASEAN tanggal 23 Juni 2009.

<sup>15</sup> Acharya, Amitav. 2019. *Why ASEAN’s Indo-Pacific Outlook Matters* diakses dari <https://www.aspistrategist.org.au/why-aseans-indo-pacific-outlook-matters/>

Terdapat 4 area kerja sama yang dituangkan dalam *outlook* tersebut, yaitu: (1) kerja sama maritim; (2) konektivitas; (3) UN SDGs 2030; dan (4) kerja sama di bidang ekonomi dan potensi kerja sama di bidang terkait lainnya, seperti pengembangan UMKM, sains dan riset teknologi, dan ekonomi digital. AOIP yang mengedepankan dialog dan kerja sama, bukan persaingan, dan menekankan pada kerja sama maritim sangat relevan dengan kebijakan pembangunan pertahanan. Salah satu sasaran Kebijakan Pertahanan Negara adalah terwujudnya kerja sama internasional bidang pertahanan dengan menganut kebijakan politik luar negeri bebas-aktif dan mengedepankan prinsip memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan sehingga pengelolaan keamanan regional untuk kepentingan bersama lebih terarah.<sup>16</sup>

### **Pertahanan Negara dan Relevansi Poros Maritim Dunia**

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan dua pertiga wilayah lautan yang lebih luas dibandingkan daratan. Luas wilayah perairan Indonesia mencapai 77 % dari

<sup>16</sup> Wawancara dengan Dirjen Strahan, Kemhan, Mayjen TNI Rizerius Eko Handisancoko, 10 Agustus 2019)

total luas wilayah NKRI. Posisi silang Indonesia ini berimplikasi pada peluang dan tantangan dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Menyadari kondisi tersebut, para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah merumuskan dan mengajukan Deklarasi Juanda pada tahun 1957, sebagai acuan bagi dunia internasional untuk mengakui wilayah kedaulatan maritim Indonesia<sup>17</sup>.

Dalam kaitannya dengan pertahanan negara, ini berarti Indonesia harus senantiasa menitikberatkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakter kemaritiman yang kuat. Mengingat 4 *chokepoints* dari 9 *chokepoints* strategis dunia terdapat di Indonesia, maka Indonesia pun memiliki peran strategis sebagai stabilisator kawasan Asia Tenggara, khususnya dari perspektif keamanan maritime. Maka dari itu, paradigma Indonesia sebagai negara maritim memang harus lebih ditegaskan. Melalui visi Poros Maritim Dunia (PMD) pemerintahan Presiden Jokowi bertekad membangun kembali kejayaan maritim Indonesia yang bermuara dari jejak-jejak sejarah

Nusantara (era Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit) dan momentum lahirnya Deklarasi Juanda di era pasca kemerdekaan.

Buku Putih Pertahanan RI<sup>18</sup> yang menyebutkan “postur pertahanan negara diwujudkan melalui pembangunan kekuatan pertahanan negara yang tidak terlepas dari visi, misi, Nawacita dan kebijakan PMD...” dan tersurat pula dalam Lampiran Permenhan RI No. 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 pada butir Pembangunan Postur Pertahanan Negara, yaitu bahwa: “pembangunan postur pertahanan negara diarahkan untuk mewujudkan postur pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dengan prinsip defensif aktif dalam rangka mendukung PMD”.

Sehubungan dengan PMD pula, Presiden Jokowi juga menegaskan komitmen Indonesia yang secara langsung berkepentingan untuk berperan menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudera Hindia (Indo-Pasifik) sehingga kawasan tersebut tetap aman dan damai bagi perdagangan dunia, bukan menjadi ajang perebutan

---

<sup>17</sup> Setiadji, Agus Laksda TNI. 2017. *Kekuatan Pertahanan Indonesia dalam Bingkai Negara Maritim*. <http://maritimnews.com/2017/05/kekuatan-pertahanan-indonesia-dalam-bingkai-negara-maritim/>, hlm.3

---

<sup>18</sup> Kemhan RI, 2015. Op.Cit. hlm 101

sumber daya alam, pertikaian wilayah dan persaingan supremasi maritim<sup>19</sup>. Ini artinya konsep kerjasama Indo-Pasifik yang digagas Indonesia dan diterima sebagai *outlook ASEAN* sangat selaras dengan PMD. Hal ini juga dikonfirmasi Menlu RI, Retno Marsudi pada saat memberikan sambutan dalam pembukaan *High Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation* di Jakarta pada 20 Maret 2019. Pada kesempatan tersebut Menlu Retno menyampaikan bahwa kerangka kerjasama Indo-Pasifik yang inklusif dan transparan akan selaras dengan visi Indonesia sebagai PMD.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Lingkungan Strategis di Indo-Pasifik bagi Pertahanan Negara: Ancaman dan Peluang**

Dinamika lingkungan strategis telah banyak menunjukkan transformasi di kawasan, khususnya dalam hal pergeseran hegemoni AS yang secara gradual tereduksi oleh pesatnya kebangkitan Cina. Dalam mencermati perubahan di kawasan berdasarkan kajian teoritis analisis lingkungan strategis, maka rivalitas AS-Cina yang semakin tajam dan menimbulkan dilema

keamanan merupakan faktor lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan Indonesia dalam langkah-langkah pembangunan pertahanan negara dalam sebuah strategi yang lebih komprehensif. Analisis lingkungan strategis selanjutnya akan menjadi dasar untuk memetakan peluang dan ancaman yang menjadi bagian inheren lingkungan strategis<sup>20</sup>.

Dari hasil penelitian pada sub bab sebelumnya telah dikaji bahwa rivalitas AS-Cina saat ini semakin memuncak dalam wujud *flashpoint* yang semakin mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan, yaitu ketegangan di Laut Cina Selatan dan Perang Dagang AS-Cina. Ancaman dan peluang yang perlu diidentifikasi dalam kedua *flashpoint* tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Ketegangan di Laut Cina Selatan**

Kompetisi strategis AS-Cina saat ini sangat kompleks. Salah satu yang menjadi mandalanya adalah Laut Cina Selatan (LCS) yang menjadi salah satu indikator lingkungan strategis. VUCA yang mencakup *volatility* (ketidakstabilan, penuh gejolak bercirikan kekerasan), *uncertainty* (ketidakpastian akibat munculnya masalah baru), *complexity*

<sup>19</sup> Marsetio, 2018. *Seapower*. Universitas Pertahanan Press, hlm. 17

<sup>20</sup> Yarger, 2006. *Op.cit.* 2

(kompleksitas, rumitnya bagian-bagian dari permasalahan), dan *ambiguity* (ketidakjelasan/ambiguitas dalam menafsirkan masalah sehingga muncul berbagai konklusi dan solusi baik yang positif maupun negatif) tercermin jelas dalam situasi LCS yang terus mengalami peningkatan ketegangan.

*Volatility* pada LCS dapat dijelaskan dari situasi yang penuh gejolak akibat ketegangan yang diwarnai tindak militerisasi baik oleh AS dan Sekutunya maupun Cina. *Uncertainty* pada sengketa wilayah LCS nampak pada tindakan Cina untuk membangun pulau-pulau *hybrid* sebagai sebuah isu baru yang menjadi kontroversi. *Complexity* dalam isu LCS mengacu pada kerumitan pada tumpang tindih sengketa wilayah yang melibatkan 6 negara dan belum terselesaikan. Eskalasi kehadiran militer AS-Cina, dan berbagai ancaman non-tradisional yang turut berproliferasi dalam konteks keamanan maritim dengan segala dimensinya menambah kompleksitas permasalahan di LCS. Sedangkan ambiguitas tercermin dari persistensi Cina untuk menegakkan klaim wilayah di perairan LCS berdasarkan *nine-dash line*, padahal hal tersebut sudah jelas

bertentangan dengan hukum internasional, UNCLOS 1982.

Ancaman dan peluang yang kemudian dapat dipetakan berdasarkan analisis lingkungan strategis di atas, adalah sebagai berikut:

a. Ancaman

i. Instabilitas kawasan akibat aksi saling provokasi dalam bentuk-bentuk militerisasi dan agenda *power projection* lainnya. Instabilitas ini berpotensi membangkitkan polarisasi konstelasi global yang bersifat bipolar yang dikhawatirkan merebak menjadi Perang Dingin jilid ke-2.

ii. Tantangan bagi isu keamanan maritim yang di antaranya termanifestasi dalam ancaman non-tradisional seperti *illegal fishing*, perompakan dan *human and drugs trafficking*.

b. Peluang

i. Negara-negara di kawasan masih berpeluang untuk memitigasi ketegangan dengan yang terjadi di LCS dengan mengembangkan kerja sama yang berlandaskan CBMs.

- ii. Kerja sama maritim yang dikembangkan di bawah payung DOC turut memberikan kesempatan bagi peningkatan kapasitas negara-negara pesertanya seperti *Workshop on Safety of Navigation and Communication at Sea* yang diselenggarakan di Manado pada bulan Desember 2018 sebagai realisasi rencana aksi yang ditetapkan oleh ASEAN-China *Joint Working Group on DOC*.

Berdasarkan ancaman dan peluang tersebut di atas, maka pemerintah perlu lebih intensif memastikan efektivitas kerja sama yang menjadi peluang bagi memajukan kepentingan nasional, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pertahanan. Kerja sama yang ditujukan untuk menghadapi ancaman bersama di kawasan dengan mengedepankan CBMs pada akhirnya akan menciptakan *peaceful environment* untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat.

## **2. Perang Dagang AS vs Cina**

Perang Dagang antara AS dan Cina turut mewarnai dinamika lingkungan strategis global yang menonjol di Abad

21. Adanya ketimpangan nilai kerja sama perdagangan antara AS-Cina di mana Cina menguasai pangsa impor AS senilai 21,6 persen sedangkan AS hanya mengakses 8,4 persen pasar impor Cina, menjadikan Trump ambisius untuk menyeimbangkan nilai perdagangan antara keduanya. Presiden Trump kemudian menaikkan tarif impor yang tinggi bagi barang Cina yang masuk ke AS. Selain itu AS juga berupaya memanfaatkan kekuatan hegemoninya di berbagai negara untuk melakukan aksi unilateral yang ditujukan untuk menekan Cina. Kejadian ini kemudian direspon dengan aksi retaliasi secara resiprokal oleh Cina. Tindakan AS sebagai sebuah strategi berkorelasi dengan pemikiran teori Gray bahwa "*strategy is the bridge that relates military power to political purpose*" yang berarti juga bahwa strategi tidak hanya mengandalkan kekuatan militer atau *hard power* untuk mencapai tujuan kemenangan, dalam hal ini keunggulan ekonomi.

Dengan menggunakan paradigma analisis lingkungan strategis yang mendasarkan pada aspek VUCA, maka *volatility* perang dagang tercermin pada gejolak dan gangguan

pertumbuhan ekonomi berpotensi menjadi konflik dan pengerahan kekuatan militer. Kajian Trinh Le (2018) mengungkapkan bahwa perang dagang yang berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Cina menjadikan Cina memilih opsi untuk lebih agresif dalam sengketa maritim di LCS dengan mendasarkan pada argumentasi nasionalisme bahwa AS telah mengganggu kedaulatan Cina atas nama kebebasan navigasi. Isu perang dagang juga menyiratkan *uncertainty* akibat belum tercapainya keberhasilan negosiasi untuk menyelesaikan hambatan tarif maupun non-tarif yang diberlakukan. Yang terjadi justru peningkatan eskalasi perang dagang dalam babak baru yang lebih dramatis. Terakhir AS menambahkan lagi beban tarif senilai 10 persen pada barang Cina per September 2019, setelah sebelumnya sudah meningkatkan tarif hingga 25 persen untuk barang Cina senilai 200 miliar Dolar AS pada Mei 2019. *Complexity* diindikasikan dari adanya sisi-sisi lain dari Perang Dagang AS-Cina seperti isu hak kekayaan intelektual dan unsur kompetisi teknologi, khususnya teknologi informasi dan

komunikasi yang telah berkembang dalam jaringan akses internet 5G. Akibatnya AS juga menerapkan hambatan non-tarif dengan melarang masuknya perusahaan teknologi asal Cina, Huawei, ke AS karena alasan keamanan siber. Pada akhirnya Perang Dagang AS-Cina telah menghadirkan ambiguitas akan makna dan motif di balik perang dagang.

Melalui pendekatan VUCA di atas, setidaknya Perang Dagang AS-Cina berpotensi memunculkan ancaman dan peluang sebagai berikut:

a. Ancaman

Eskalasi Perang Dagang AS-Cina yang belum mereda berpotensi menjadi ancaman nyata bagi pertumbuhan ekonomi global, termasuk Asia Tenggara. Bahkan berdasarkan data *Trading Economics 2019*, negara ASEAN dengan perekonomian yang maju seperti Singapura pun terancam resesi. Indonesia juga tidak luput dari perlambatan ekonomi sebagai dampak perang dagang. Pada kuartal II 2019, pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,05 persen, merosot dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya pada angka 5,27 persen.

Resesi yang terjadi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan seluruh aktivitas ekonomi, seperti lapangan kerja, investasi dan keuntungan perusahaan. Kondisi semacam ini tentu dapat menimbulkan dampak *spillover* permasalahan sosial dan politik keamanan. Perang Dagang juga diwarnai ancaman keamanan siber akibat kompetisi teknologi yang berpotensi digunakan sebagai alat *spionase* sebagaimana terjadi pada kasus Huawei.

#### b. Peluang

Akibat dampak Perang Dagang AS-Cina terhadap perlambatan ekonomi beberapa negara lainnya tentu menjadikan negara-negara di kawasan harus mampu menangkap peluang untuk terus mempererat kerja sama ekonomi perdagangan. Di tingkat ASEAN, momentum perang dagang sudah seharusnya menjadi pendorong penyelesaian perundingan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Secara internal, Indonesia juga perlu aktif

mendorong investasi melalui partisipasi yang selama ini sudah berjalan dengan AS dalam kerangka *Trade Investment Framework Agreement*.

Dalam ranah ekonomi domestik, pemerintah juga perlu terus memperkuat infrastruktur ekonomi kerakyatan yang dapat menjadi penyelamat perekonomian nasional di saat mengalami dampak sistemik dari sebuah krisis global. Koperasi-koperasi dan usaha kecil menengah akan menjadi kunci revitalisasi ekonomi kerakyatan. Langkah yang dapat dilakukan di antaranya adalah diversifikasi produk ekspor yang diiringi pengembangan kemudahan bisnis dan peningkatan daya saing produk domestik. Pemberdayaan otonomi daerah juga semakin penting untuk menginventarisasi produk unggulan daerah yang potensial untuk memacu ekspor dari UMKM.

Terkait ancaman isu keamanan siber, Indonesia juga berpeluang untuk meningkatkan pertahanan siber yang akan berperan signifikan dalam fungsi perlindungan data, antisipasi *cyberterrorism*, dan

perlindungan bagi obyek-obyek vital negara yang strategis dari kejahatan siber.

Identifikasi peluang dan ancaman terhadap dua *flashpoint* kunci di kawasan Indo-Pasifik di atas merupakan komponen analisis *scanning* sebagaimana disampaikan Bandoro dalam Pedrason<sup>21</sup> (2019:7-8). Tahap berikutnya dalam komponen analisis setelah *scanning* adalah *monitoring*, *forecasting*, dan *assesment* (dalam hal ini mengamati dan mengikuti pola persaingan AS-Cina) hingga mencapai pada tahap *policy measures*. Berangkat dari serangkaian aktivitas analisis tersebut, maka Indonesia semestinya merespon dinamika lingkungan strategis dengan segala *flashpoint* yang ditimbulkan dengan tetap bersandar pada politik luar negeri bebas aktif, khususnya dalam menyikapi hubungan bilateralnya dengan AS maupun Cina.

Indonesia harus memanfaatkan *alignment* dari berbagai lini secara berimbang, termasuk dengan AS dan Cina. Dengan demikian Indonesia tetap bisa menjaga kredibilitasnya sebagai

*natural leader* sekaligus *honest broker* di tengah hingar bingar proyeksi kekuatan yang dilakukan negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks inilah Indonesia telah tampil untuk menawarkan sebuah konsep Indo-Pasifik yang lebih inklusif dengan tujuan untuk memitigasi ketegangan yang masih terus berkembang seiring diskursus Indo-Pasifik. Melalui proses perundingan di tingkat ASEAN, konsep ini telah disepakati menjadi sebuah *outlook*, yaitu *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) yang diharapkan akan terus mengedepankan kerja sama guna memperkuat arsitektur kawasan sehingga tercipta suatu lingkungan yang stabil dan penuh perdamaian (*peaceful environment*) sebagai prasyarat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

### **Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik untuk Mendukung Pertahanan Negara**

Diplomasi Indonesia telah sukses memajukan konsep Indo-Pasifik di tingkat ASEAN hingga *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) yang bermuara dari perspektif Indonesia kini diterima

---

<sup>21</sup> Pedrason, Rodon. (2019). Intelijen dan Lingkungan Strategis. (online) dalam <https://stin.ac.id/jurnal/download.php?file=20190228-INTELIJEN%20DAN%20LINGKUNGAN%20STRATEGIS.pdf>

sebagai *outlook* kolektif dan disahkan pada KTT ke-34 ASEAN, pada 23 Juni 2019. Dokumen tersebut memuat garis kebijakan ASEAN mengenai ruang lingkup, tujuan, prinsip, area kerja sama dan mekanisme yang akan digunakan. Dokumen ini akan menjadi cara pandang atau wawasan bagi ASEAN dalam melihat Indo-Pasifik sebagai sebuah kawasan yang terintegrasi dan terkoneksi, mengedepankan dialog dan kerjasama, menitikberatkan pembangunan untuk kesejahteraan dan menjadikan aspek maritim sebagai elemen tata kawasan. Adapun mekanisme inti yang akan memfasilitasi berbagai kerjasama dalam AOIP nantinya adalah East Asia Summit (EAS) di mana pembahasan yang lebih strategis serta kerjasama yang lebih praktisnya bias menggunakan menggunakan mekanisme ASEAN *Plus One*, ASEAN *Regional Forum* (ARF), dan ASEAN *Defence Ministerial Meeting* (ADMM) *Plus*.

Adapun lingkup kerja sama AOIP yang tersurat pada butir V no.13 – 20 mengenai *Areas of Cooperation* mencakup Kerja sama maritime, kerjasama konektivitas, kerjasama untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 (UN *Sustainable*

*Development Goals-SDG 2030*), serta kerjasama ekonomi dan potensi kerjasama di bidang terkait lainnya. Indonesia melalui AOIP lebih menghendaki peningkatan efektivitas kerja sama dalam menghadapi ancaman nyata yang jelas-jelas menjadi ancaman bersama di kawasan seperti kerjasama mengatasi ancaman non-tradisional.

Mengingat AOIP juga berangkat dari perspektif yang digagas Indonesia, maka Indonesia pun perlu menjadikan dokumen *outlook* tersebut sebagai dasar untuk menyusun strategi kerja sama yang diprioritaskan dalam mendukung pertahanan negara. Mengingat konsep Indo-Pasifik mencurahkan perhatian yang lebih luas pada dimensi maritim, maka korelasi strategi pertahanan juga perlu dititikberatkan pada strategi pertahanan maritim.

Pertahanan maritim tentu juga akan mencakup aspek militer dan nonmiliter mengingat strategi pertahanan negara menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) didesain untuk dapat menangkal ancaman yang bersifat militer maupun non militer. Oleh karena itu strategi kerja sama dalam kerangka AOIP juga perlu diarahkan pada penguatan pertahanan militer dan nonmiliter yang

didominasi dimensi kemaritiman sesuai dengan area kerja sama AOIP.

Keterpaduan strategi pertahanan militer dan nirmiliter yang turut didukung dari efektivitas kerja sama Indo-Pasifik harus diimplementasikan secara konsisten dan simultan demi terciptanya pertahanan yang bersifat semesta dan paripurna. Strategi yang dapat mendukung Indonesia untuk memperkuat pertahanan militer dan nirmiliter dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Pertahanan Militer**

#### **a. Penguatan Postur Pertahanan untuk Mengatasi Ancaman Nyata**

Strategi pertahanan Indonesia perlu menekankan integrasi karakteristik kekuatan masing-masing kekuatan pertahanan, baik darat, laut dan udara, tanpa adanya dominasi matra. Postur pertahanan yang lebih terpadu akan semakin menemukan relevansinya apabila dikaitkan dengan tren ancaman asimetris. Konsep *joint pattern* dalam implementasi postur pertahanan perlu diurusutamakan mengingat Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi juga sudah berkomitmen mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam

skala yang lebih luas yang berprinsip *outward looking* dan berpedoman pada kebijakan luar negeri bebas aktif, langkah menuju keterpaduan matra dapat semakin diasah melalui kerja sama Indo-Pasifik, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu keamanan maritim dan isu keamanan non-tradisional lainnya.

Indonesia akan menemui kesulitan apabila menghadapi ancaman non-tradisional dengan langkah unilateral atau secara sendiri, mengingat sifat ancaman yang semakin menembus lintas batas Negara. Maka dari itu Indonesia perlu melakukan kerja sama dengan Negara lain. Kerja sama Keamanan di bidang militer memiliki dampak positif terhadap upaya untuk mengatasi ancaman non-tradisional seperti pembajakan/ *maritime terrorism* yang terjadi di kawasan. Selain itu, kerja sama ini juga akan semakin mengasah kapabilitas militer Indonesia.

Kerja sama regional di bidang keamanan maritim diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi perdagangan di wilayah laut dan menjaga stabilitas jalur perdagangan.

Ini artinya kerja sama keamanan maritim yang tercantum dalam salah satu butir area kerja sama AOIP perlu menjadi prioritas yang perlu ditindaklanjuti dalam kerja sama untuk memperkuat kapabilitas pertahanan militer Indonesia dalam menghadapi ancaman non tradisional, khususnya dalam isu keamanan maritim, termasuk diantaranya yang berkaitan dengan pencurian ikan, perompakan, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan aktivitas ilegal lainnya yang dilakukan di wilayah perairan Indo-Pasifik.

**b. Penguatan Diplomasi Pertahanan**  
kerja sama internasional Indonesia dikembangkan sebagai salah satu instrumen diplomasi pertahanan dalam mewujudkan kepentingan nasional di bidang pertahanan. Langkah kerja sama tersebut harus memastikan efektivitas yang dicapai untuk mendapatkan hasil yang saling menguntungkan. Karena itulah kerja sama internasional di bidang pertahanan harus dapat diarahkan untuk menjembatani terwujudnya stabilitas keamanan kawasan sebagai kepentingan bersama yang menguntungkan satu sama lain.

Diplomasi pertahanan di pandang sebagai sebuah fusi strategi yang saling menguntungkan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagaimana dinyatakan oleh John. F. Kennedy bahwa “ *diplomacy and defense are not substitute for one another. Either alone would fail*”. Maka diplomasi dan pertahanan merupakan satu kesatuan utuh yang saling membutuhkan, bukan saling menggantikan satu sama lain. Bagi Indonesia, diplomasi pertahanan secara esensial dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme TNI melalui kerja sama seperti dialog strategis, pertukaran perwira siswa, dan latihan bersama.

Sebagai bagian dari sebuah strategi besar, diplomasi Indonesia selayaknya memberikan penekanan kepada beberapa hal yang krusial untuk di prioritaskan oleh Indonesia sebagai negara berkembang yang hendak dijadikan pasar potensial di kawasan Indo-Pasifik. Untuk memastikan AOIP dapat mendukung pertahanan negara, maka bentuk-bentuk kerja sama diplomasi pertahanan Indonesia perlu yang diarahkan bagi akselerasi

kemandirian industri pertahanan nasional serta dukungan bagi *capacity building* SDM militer Indonesia.

i. Dukungan Bagi Kemandirian Industri Pertahanan.

Saat ini upaya pengembangan industri pertahanan negara melalui corong diplomasi pertahanan sesungguhnya sudah membuahkan hasil yang cukup baik, meski tetap harus lebih di gencarkan lagi. Sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu bahwa rekapitulasi penjualan produk industri pertahanan atau ekspor ke sejumlah negara mencapai 284,1 juta dolar AS, atau Rp 4,5 triliun, selama tahun 2015 hingga 2018. Angka penjualan sebesar 161 juta dolar dilakukan PT. Dirgantara Indonesia. Adapun rincian produknya meliputi CN-235 sebanyak dua unit ke Senegal, tiga unit NC-212 ke Vietnam, dan dua unit NC-212 ke Thailand. Kemudian, melalui PT. PAL sebesar 86,9 juta dolar ke Filipina dengan produk berupa dua unit kapal *Strategic Sealift Vessel* (SSV). Selain itu, ekspor PT. Pindad dengan produk panser Anoa, kendaraan tempur,

senjata dan amunisi untuk memenuhi kebutuhan sejumlah negara di Asia Tenggara, Afrika, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Nigeria, serta Timor Leste. Selain itu, PT. Lundin juga melakukan ekspor ke Rusia dan Swedia dengan produk berupa kapal *Sea Rider* senilai 3,6 juta dolar<sup>22</sup>.

Selain itu dukungan kemandirian industri pertahanan melalui diplomasi pertahanan lainnya dapat dilihat dari kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam program pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. Secara keseluruhan proses diplomasi Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua fase. Fase pertama yakni fase inisiasi kerja sama sampai disepakati untuk porsi CSA dan WAA sebesar 80:20, serta lisensi penggunaan data-data intelektual. Setelah adanya kendala anggaran dan evaluasi program KFX/IFX oleh pemangku kebijakan pada tahun 2017, fase kedua diplomasi pertahanan dimulai dengan tujuan kembali melancarkan kerja sama program KFX/IFX dengan

---

<sup>22</sup> Nurrohman, Gunawan, Sumarlan. 2019. Peran Diplomasi Pertahanan dalam Implementasi Kebijakan Kerjasama Program KFX/IFX Indonesia-Korea Selatan. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol 5. No 1. April 2019

catatan ada renegotiasi beberapa aspek kerja sama.

## ii. Capacity Building SDM Militer Indonesia

Dukungan *capacity building* melalui diplomasi pertahanan menyasar kepada upaya Indonesia melakukan negosiasi kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain yang tujuan akhirnya adalah meningkatnya kemampuan SDM Militer Indonesia. secara garis besar sesungguhnya berbagai kegiatan diplomasi pertahanan berada pada kerangka yang sangat memungkinkan dalam upaya pengembangan *capacity building* SDM Militer Indonesia. Keikutsertaan SDM militer Indonesia dalam berbagai perundingan di bawah ADMM, ARF dan berbagai perundingan pertahanan lainnya secara tidak langsung telah melatih kemampuan dan kecakapan pengetahuan serta pengalaman mereka dalam negosiasi terkait pertahanan.

Selain itu *capacity building* juga bisa diarahkan kepada berbagai program kerja sama pertahanan bersama yang bertujuan untuk

membangun kemampuan SDM militer beberapa negara sekaligus, yakni melalui program kerjasama yang disebut sebagai *joint training* ataupun *coordinated joint patrol*. Peningkatan *capacity building* terhadap SDM militer Indonesia yang merupakan bagian dari hasil upaya diplomasi pertahanan adalah adanya kerjasama pertahanan antara Indonesia dan beberapa negara lain yang memberikan beasiswa belajar kepada perwira TNI. Pemberian beasiswa, *short course*, dan berbagai pelatihan ini tentu dapat meningkatkan *skill* TNI sebagai SDM militer Indonesia.

## 2. Pertahanan Nirmiliter

### a. Penguatan Pertahanan Siber

Saat ini spektrum ancaman di ruang siber semakin beragam, meliputi kejahatan siber, spionase, *cyberterrorism*, *ransomware* dan masih banyak lagi sehingga seluruh negara harus mewaspadainya sebagai sebuah ancaman bagi keamanan. Resiko ini telah membuat ASEAN makin terdesak untuk menyediakan *platform* kerja sama dalam menciptakan ruang siber yang aman dan tangguh yang

memungkinkan kemajuan ekonomi dan standar kehidupan yang lebih baik. Pada April 2017 *ASEAN Cyber Capacity Program (ACCP)* diluncurkan untuk menjawab tantangan kerja sama di bidang siber.

Dalam kaitan ini, Indonesia juga perlu memasukkan kerja sama siber sebagai prioritas untuk memperkuat pertahanan siber melalui mekanisme yang sudah ada di dalam kerangka AOIP. Selain ACCP, Indonesia juga dapat terus mendorong kerja sama bilateral dengan negara-negara maju di kawasan Indo-Pasifik untuk kemajuan pertahanan siber dan intelijen sehingga semakin mendukung kemampuan pertahanan negara.

**b. Penguatan Diplomasi Ekonomi Untuk Menjaga Ketahanan Ekonomi dari Ekses Ketidakpastian Ekonomi Global**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memungkinkan terselenggaranya pembangunan di bidang strategis lainnya, termasuk pertahanan negara. Dalam konteks ini, langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi menjadi sebuah wujud pertahanan nirmiliter di tengah situasi lingkungan

strategis ekonomi global yang tidak menentu. Kekuatan nasional yang dapat digunakan untuk menyusun strategi pertahanan nirmiliter sebagaimana konsep DIME adalah diplomasi, termasuk diplomasi modern yang termanifestasi dalam diplomasi ekonomi dan diplomasi digital guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks kerja sama Indo-Pasifik maka Indonesia dapat mengarahkan diplomasi ekonomi dan diplomasi digital untuk menjadi media optimaslisasi kerja sama ekonomi antarnegara, bahkan menebarkan pesan perdamaian.

Salah satu *benchmark* forum regional di bidang diplomasi digital untuk ekonomi dan perdamaian adalah *Regional Conference on Digital Diplomacy* yang digelar di Jakarta pada 10 September 2019. Selain itu Indonesia juga perlu memajukan proses negosiasi *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* yang berpotensi mendorong pertumbuhan industri di dalam negeri dan meningkatkan intensitas Indonesia sebagai bagian dari

jaringan produksi global (*global supply chain*).

### **c. Penguatan Diplomasi untuk Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan NKRI**

Diplomasi akan menjadi langkah *soft power* untuk mendukung tercapainya kepentingan nasional, karena itulah diplomasi menjadi elemen penting dalam konsep DIME menurut Farlin (2014)<sup>23</sup>. Menurut Buku Putih Pertahanan (2015:75) Usaha-usaha diplomasi berintikan peran pertahanan nirmiliter yang dilakukan melalui pendekatan politik dan ekonomi. Selain itu peran diplomasi harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi ancaman berdimensi politik yang mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI, serta melakukan langkah-langkah pencegahan.

Ancaman disintegrasi masih menjadi isu krusial bagi keutuhan NKRI yang merupakan bagian dari aspek pertahanan negara. Isu pemisahan Papua dari NKRI masih terus menjadi sorotan hingga saat ini dan menjadi perhatian utama

TNI/Polri. Dalam konteks ini, langkah diplomasi Indonesia tidak pernah sekalipun memberikan kesempatan kepada pihak eksternal untuk menawarkan mediasi atau melakukan intervensi melalui internasionalisasi isu Papua.

Sejauh ini diplomasi Indonesia untuk menggalang dukungan bagi kedaulatan dan keutuhan NKRI telah berjalan dengan cukup baik. Yang terkini, Sekjen PBB Antonio Guterres telah menegaskan bahwa PBB mendukung kedaulatan dan integritas wilayah NKRI saat bertemu dengan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani, pada 10 September 2019 di New York, AS. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam *NY Agreement 1962, Act of Free Choice 1969* dan Resolusi GA PBB 2504 (XXIV) 1969 terkait status final Papua di dalam Indonesia berdasarkan *uti possideti iuris*.

Berbagai peluang untuk memperkuat diplomasi harus dimaksimalkan, termasuk pencalonan diri Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Untuk lebih menggalang dukungan internasional dalam isu Papua,

---

<sup>23</sup> Farlin, Commander Jeff. 2014. *Instruments of National Power: How America Earned Independence*. Carlisle Barracks, PA: US Army War College.

Indonesia dapat pula memanfaatkan kerangka kerja sama Indo-Pasifik. Indonesia perlu terus menggerakkan diplomasi dalam rangka melindungi integritas wilayah dan keutuhan NKRI. Indonesia juga perlu memberdayakan forum-forum kerja sama di Pasifik Selatan, seperti *Pacific Island Forum (PIF)*, mengingat pentingnya negara-negara di Pasifik Selatan dalam persoalan Papua.

Pada akhirnya keterpaduan strategi pertahanan militer dan nirmiliter dengan memanfaatkan kerja sama Indo-Pasifik ini akan makin mendukung suatu strategi pertahanan semesta yang membutuhkan komitmen dan kerja keras seluruh komponen bangsa. Pemetaan prioritas kerja sama dalam kerangka AOIP yang akan diproyeksikan untuk mendukung pertahanan negara, baik militer dan nirmiliter, memerlukan komitmen pemerintah untuk tetap melakukan kendali total dalam suatu sistem kebijakan nasional. Dalam hal ini faktor kepemimpinan akan memegang peran penting sebagaimana konsep perang semesta.

Selanjutnya keberhasilan Indonesia merealisasikan PMD akan menjadi

indikator penting bagi kelanjutan aspirasi Indonesia dalam kerja sama Indo-Pasifik yang berbasis AOIP. Keselarasan antara keduanya juga akan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih disegani sehingga secara tidak langsung turut memberikan efek penggentar (*deterrence effect*) yang bermakna krusial bagi pertahanan negara.

### **Kesimpulan**

Masa depan Indo-Pasifik akan bergantung pada upaya menjadikan kawasan ini sebagai arena kerja sama bagi kepentingan bersama (*common interest*) untuk menopang kesejahteraan kawasan dibandingkan menjadikan kawasan tersebut sebagai mandala perang yang destruktif bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk menunjang kelancaran pembangunan yang diarahkan pada pembangunan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan upaya dalam mengatasi ancaman-ancaman nyata dalam suatu upaya pertahanan negara. Berdasarkan telaah lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik, ancaman-ancaman nyata tersebut menyeruak di antara dua *flashpoint* yang menonjol saat ini, yaitu ketegangan di Laut Cina

Selatan dan Perang Dagang AS-Cina. Ancaman-ancaman nyata yang berwujud perompakan, *illegal fishing*, penyelundupan narkoba, kejahatan siber, resesi yang mengakibatkan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan berujung pada gejolak dan instabilitas keamanan. Ancaman-ancaman nyata tersebut tentu berimbas pada stabilitas keamanan yang dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan langkah-langkah pembangunan di bidang lainnya.

ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) yang bercikal bakal dari perspektif Indonesia sudah semestinya dapat dioptimalkan untuk mencapai kepentingan nasional. Dengan mencermati ruang lingkup kerja sama yang dielaborasi dalam AOIP, Indonesia perlu memformulasikan suatu strategi kerja sama Indo-Pasifik dari perspektifnya sendiri dan menindaklanjutinya dalam kebijakan-kebijakan di tingkat teknis berupa prioritas implementasi kerja sama yang dapat menguntungkan bagi kepentingan nasional, termasuk diantaranya untuk mendukung pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional. Salah satu

konsideran penting dalam pembangunan pertahanan adalah persepsi ancaman (*threat based*). Untuk itulah pemetaan ancaman berdasarkan analisis lingkungan strategis akan relevan dalam penentuan sebuah strategi pertahanan, termasuk dalam hal mengembangkan peluang yang juga dicermati dari situasi lingkungan strategis terkini.

Khusus di bidang pertahanan, Indonesia dapat menjadikan AOIP sebagai salah satu modalitas dalam mendukung pertahanan militer dan nirmiliter yang dipadukan menjadi bagian dari strategi pertahanan semesta dalam menghadapi ancaman-ancaman yang telah diidentifikasi berdasarkan dinamika lingkungan strategis, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Ancaman nyata yang perlu diantisipasi bersama dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik yang menonjol saat ini adalah isu-isu keamanan maritim dan perlambatan kinerja ekonomi global yang salah satunya diakibatkan oleh Perang Dagang yang juga diwarnai dengan isu keamanan siber. Kerja sama-kerja sama Indo-Pasifik yang akan dominan menggunakan mekanisme ASEAN dengan melibatkan mitra eksternal ASEAN perlu menjadi pertimbangan Indonesia dalam

menyusun kebijakan kerja sama prioritas di bidang pertahanan negara.

Kerja sama Indo-Pasifik berbasis AOIP yang akan diprioritaskan untuk mendukung pertahanan negara harus diarahkan untuk langkah-langkah penguatan pertahanan militer dan nirmiliter. Kerja sama untuk penguatan pertahanan militer akan diarahkan pada dukungan untuk memperkuat postur pertahanan dari sisi kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, khususnya dengan menitikberatkan pada pertahanan maritim yang diarahkan untuk mendukung PMD. Dengan postur pertahanan yang semakin paripurna maka kekuatan TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara akan lebih meningkat. Peningkatan postur ketiga elemen postur pertahanan akan berdampak pula pada efektivitas upaya-upaya menghadapi ancaman, baik ancaman nyata maupun ancaman belum nyata. Kerja sama dalam konteks diplomasi pertahanan juga menjadi strategi Indo-Pasifik yang dapat diarahkan untuk mendukung langkah Indonesia membangun kemandirian industri pertahanan serta pembangunan kapasitas bagi personel TNI.

Sedangkan strategi kerja sama Indo-Pasifik dari perspektif Indonesia berdasarkan AOIP perlu diarahkan pada prioritas penguatan pertahanan nirmiliter, yaitu dalam membangun pertahanan siber, penguatan diplomasi ekonomi dan mempertajam diplomasi untuk mendukung langkah penegakan kedaulatan dan keutuhan NKRI, khususnya yang berkaitan dengan isu Papua. Strategi kerja sama ini pada akhirnya memerlukan sinergi dan koordinasi dari K/L terkait dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri sebagai instansi penjurur (*focal points*).

#### **Rekomendasi**

Penelitian ini pada akhirnya merekomendasikan beberapa langkah yang perlu ditindaklanjuti untuk lebih mematangkan strategi kerja sama Indo-Pasifik yang didasarkan pada AOIP, khususnya dalam mendukung pertahanan negara yang bersifat semesta. Rekomendasi ditujukan pada *stakeholder* terkait, yaitu:

1. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Kedua kementerian ini akan menjadi instansi kunci yang menjadi *focal points* dalam pelaksanaan pertahanan negara yang bersifat defensif aktif dan diarahkan

lebih bersifat *outward looking* dengan menitikberatkan diplomasi sebagai lini terdepan pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri perlu duduk bersama memformulasikan prioritas kerja sama Indo-Pasifik yang diarahkan untuk penguatan pertahanan militer dan nirmiliter dalam sebuah rancangan strategi tersendiri sehingga nantinya akan dapat dilakukan pengukuran efektivitas (evaluasi efektivitas) secara periodik dan menjadi bagian dari *Strategic Defense Review (SDR)* yang sudah diterapkan.

2. Pemangku kepentingan terkait program kemandirian industri pertahanan yang tercakup dalam *triple helix*, yaitu akademisi pendidikan tinggi, industri pertahanan dan pemerintah. Sinergi ketiga komponen tersebut juga diperlukan untuk melakukan *assesment* dan kajian lebih lanjut mengenai inovasi-inovasi yang dibutuhkan industri pertahanan menuju kemandirian yang nyata dengan memanfaatkan kerja sama Indo-Pasifik. Ini menjadi bagian dari langkah untuk mengurangi *importation of weaponry* yang tidak memberikan *multiplier effect* secara ekonomi.

3. Akademisi secara luas, khususnya yang menekuni isu-isu di bidang pertahanan dan hubungan internasional (HI) perlu melanjutkan pengkajian dan pengembangan strategi yang berkaitan dengan Indo-Pasifik sebagai sebuah geostrategi. Hal ini dikarenakan proses perumusan strategi juga harus selalu disesuaikan dan dimutakhirkan berdasarkan pengamatan atas perubahan lingkungan strategis yang akan terus bergerak dinamis dari waktu ke waktu.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Yarger, Harry. R. (2006). *Strategic Theory for The 21st Century : The Little Book on Big Strategy*. Strategic Studies Institute Carlisle
- Marsetio, 2018. *Seapower*. Universitas Pertahanan Press

##### **Jurnal**

- Pedrason, Rodon. (2019). Intelijen dan Lingkungan Strategis. (online) dalam <https://stin.ac.id/jurnal/download.php?file=20190228-INTELIJEN%20DAN%20LINGKUNGAN%20STRATEGIS.pdf>
- Nurrohman, Gunawan, Sumarlan. 2019. Peran Diplomasi Pertahanan dalam Implementasi Kebijakan Kerjasama Program KFX/IFX Indonesia-Korea Selatan. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol 5. No 1. April 2019
- Acharya, Amitav. 2019. *Why ASEAN's Indo-Pacific Outlook Matters* diakses dari

<https://www.aspistrategist.org.au/why-aseans-indo-pacific-outlook-matters/>

### Website

Andika, Dedi. 2019. *Aksi FONOps Amerika Serikat di LCS Telah Mengusik China* diakses dari <https://jakartagreater.com/aksi-fonops-amerika-serikat-di-lcs-telah-mengusik-china/>

Winarno, Tri. 2019. *Perang Dagang Amerika-Cina Ronde Kedua*, diakses dari <https://kolom.tempo.co/read/1236097/perang-dagang-amerika-cina-ronde-kedua/full&view=ok>

Le Trinh, 2018. *How the US-China Trade War Could Impact the South China Sea*. <https://thediplomat.com/2018/11/how-the-us-china-trade-war-could-impact-the-south-china-sea/>

Setiadji, Agus Laksda TNI. 2017. *Kekuatan Pertahanan Indonesia dalam Bingkai Negara Maritim*. <http://maritimnews.com/2017/05/kekuatan-pertahanan-indonesia-dalam-bingkai-negara-maritim/>

Khasru, Syed Munir. (2017). "The Geopolitical Landscape of Asia Pacific Is Changing Dramatically. Here's How" (online). dalam <https://www.weforum.org/agenda/2017/07/the-geopolitical-landscape-of-asia-pacific-is-changing-dramatically-here-s-how/> hlm.6-9

Irfani, Faisal. 2019. "Rivalitas Cina-AS dan Lonjakan Anggaran Militer Global" dari <https://tirto.id/rivalitas-cina-as-dan-lonjakan-anggaran-militer-global-dnAv>, hlm.2-3

Ras, Abdul Rivai. (2018). "Kerja Sama Indo-Pasifik harus Kompatibel dengan Poros Maritim Dunia"

diakses dari <https://kumparan.com/abdul-rivai-ras/kerjasama-indo-pasifik-harus-kompatibel-dengan-poros-maritim-dunia-1538475910679321746>, hlm.7

Huang, David. (2015). "Building Security and Integration in The Asia Pacific" (online). dalam <http://www.eastasiaforum.org/2015/06/13/building-security-and-integration-in-the-asia-pacific/>, hlm.16

### Sumber lain

Farlin, Commander Jeff. 2014. *Instruments of National Power: How America Earned Independence*. Carlisle Barracks, PA: US Army War College.

Wawancara dengan Dirjen Strahan, Kemhan, Mayjen TNI Rizerius Eko Handisancoko, 10 Agustus 2019)

Kuliah Umum yang diberikan oleh Menteri Pertahanan RI 2015-2019, Ryamizard Ryacudu. "Kalibrasi Ulang Konsep Strategi Pertahanan RI Menghadapi Disrupsi Dinamika Perkembangan Lingkungan Strategis" yang disampaikan di Auditorium Universitas Pertahanan, Rabu 19 September 2018

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2018. *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Y.M. Retno L. P. Marsudi 9 Januari 2018*"

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,